

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F., Alam, A. S., & Wantu, S. M. (2012). *Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori Dan Aplikasi; Sampel Teknik Analisa; Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Refika Aditama.
- Almunaware, A. N., Regar, P. M., & Senduk, J. (2015). Analisis Isi Berita Kontroversi Basuki Tjahaja Purnama Dalam Konteks Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Pada Surat Kabar Tribun Manado. *E-journal Acta Diurna, Volume IV no. 3*.
- Bachtiar, P. P. (2011, September 1). Menghasilkan Bukti Sebagai Informasi Bagi Proses Penyusunan Kebijakan Di Indonesia: Tantangan Pada Sisi Penawaran. *Smere*, 32, p. 3.
- Basyir, A. (2014). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif. *Jurnal IUS, Volume II Nomor 5*, 285-306.
- BPHN. (2013). *Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perumahan Rakyat*. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional.
- BPS. (2016). *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2016*. Yogyakarta: BPS.
- BPS. (2017). *Kota Yogyakarta Dalam Angka 2017*. Yogyakarta: BPS.
- Fatwadi, M. (2015). *Bahan Ajar Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Agenda Diagnostic Reading Membangun Tim Efektif*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Hastijanti, R. (2011). Sisi Lain Hunian Berimbang Dalam Satu Hamparan. In *Inforum, Inforum Lingkungan Hunian Berimbang* (p. 18). Jakarta : Researchgate.
- Herwangi, Y., Pradono, Syabri, I., & Kusti, I. (2014). *Pemilihan Lokasi Tempat Tinggal dan Penggunaan Sepeda Motor pada Masyarakat Berpendapatan Rendah: Kasus Studi Kawasan Perkotaan Yogyakarta*. *Seminar Cities 2014*, 1-8.
- Huda, N. (2006, January). Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum, Volume 13 No.1*, 27-37.
- Irfiyanti, Z., & Widjonarko. (2014). Penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa Ditinjau Dari Preferensi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Teknik PWK, Volume 3 Nomor 2014*, 626.

- Japardi, L. (2018). *Penerapan Konsep Hunian Berimbang Dalam Pembangunan Rumah Susun Komersial (Studi Pada Royal Condominium Medan)*. Medan, Indonesia: Universitas Sumatera Utara.
- Kementerian Keuangan, D. (2015). *Peranan Apbn Dalam Mengatasi Backlog Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
- Kordi, G. (2016, Desember 23). *Memahami Tahapan dan Penerapan Peraturan Daerah Sesuai Kaidah*. Retrieved from Mampu.or.id:  
<http://www.mampu.or.id/kegiatan/pentingnya-pembuatan-dan-implementasi-perda-sesuai-kaidah-dan-kebutuhan/>
- Kristarani, H. (2018). *Implementasi Hunian Berimbang Di Kota Yogyakarta*. Retrieved 2018, from Academia.edu:  
[https://www.academia.edu/34802337/Implementasi\\_Hunian\\_Berimbang\\_Di\\_Kota\\_Yogyakarta](https://www.academia.edu/34802337/Implementasi_Hunian_Berimbang_Di_Kota_Yogyakarta)
- Kusumanegara, S. (2010). *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta, DIY: Gava Media.
- LAN. (2008). *Analisis Kebijakan Publik Modul Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- LAN. (2015). *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Lele, G. (2016). Pengelolaan Konflik Dalam Kebijakan Publik. In A. Subarsono, *Kebijakan Publik Dan Pemerintahan Kolaboratif Isu Isu Kontemporer* (p. 1). Yogyakarta: Gava Media.
- Lumingkewas, C. S. (2016). Analisis Yuridis Pemaknaan Konsep Dalam Pasal 16 Undang-Undang Rumah Susun Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Jurnal Arena Hukum*, 9, 421-441.
- Maharani, S. (2015). Pembangunan Perumahan Dengan Hunian Berimbang Bagi Pemenuhan Kebutuhan Rumah Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Volume 9 Nomor 1*, 41-50.
- Maloutas, T. (2016). Vertical segregation: Mapping the vertical social stratification of residents in Athenian apartment buildings. *Mediterranee - Research Gate*, 27 - 36.
- Mayasari, O. (2010). *Communal Living Di Rumah Susun Studi Kasus Rumah Susun Sederhana Sewa Jogoyudan Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Mungkasa, O. (2013). Catatan Kritis Hunian Berimbang. *Edisi 4*.



- Natera-Rivas, J., & Vargas, R. L. (2017). Vertical Segregation In Southern European Cities. The Case Of Malaga Spain. *Papeles de POBLACIÓN*, No. 92.
- Nugroho, R. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurfatriani, F., Darusman, D., & Nurrochmat, D. (2015, Agustus). Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 2 No. 2, 105-124.
- Pemerintah Kota. (2016). *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rumah Susun Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 2*. Yogyakarta: Sekretaris Daerah.
- Pemerintah Kota. (2016). *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rumah Susun*. Yogyakarta: Sekretaris Daerah.
- Pramesti, T. A. (2013, Juni 7). *Bisakah PP Dibentuk Tanpa Ada Perintah UU?* Retrieved 2019, from Hukumonline.com:  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51a45116536ea/bisakah-pp-dibentuk-tanpa-ada-perintah-uu>
- Ritohardoyo, S. (2015). *Strategi Pembangunan Rumah Susun Berkelanjutan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Rohim, N. (2014). Kontroversi Pembentukan Perppu nomor 1 tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa. *Jurnal Cita Hukum*, Volume 2 No. 1, 117.
- Rusli, B. (2013). *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. (N. M. Wiganda, Ed.) Bandung: Hakim Publishing.
- Siburian, K. (2013). *Tinjauan Yuridis Terhadap Status Keberadaan Rumah Susun Berdasarkan UU No 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun*. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Siregar, A. (2013, Januari 17). *arpansiregar*. Retrieved Februari 2018, from <https://arpansiregar.wordpress.com>:  
<https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/>
- Soebroto, A. C. (2012, Maret 8). *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Dibawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bepenas*. Retrieved 2019, from Birohukum.bappenas.go.id:

[http://birohukum.bappenas.go.id/data/data\\_presentasi/WORKSHOP%20Peraturan%20kebijakan%20di%20Kementerian%20PPN%20%20bappenas.pdf](http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_presentasi/WORKSHOP%20Peraturan%20kebijakan%20di%20Kementerian%20PPN%20%20bappenas.pdf)

Soekatno, Y. (2015, Mei 8). *diklat.jogjaprov.go.id*. Retrieved Januari 2018, from Badan

Diklat: <http://diklat.jogjaprov.go.id/v2/kegiatan/artikel/item/87-pemecahan-masalah-dan-pengambilan-keputusan>

Somantri, G. R. (2005, Desember). Memahami Metode Kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora, Volume 9 No.2*, 57-65.

Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.

Tesano. (2015). Hirarkhisitas Kedudukan Peraturan Menteri Dengan Peraturan Daerah Dalam Sistem Peraturan Perundang - Undangan Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Nestor MAgister Hukum, Volume 2 No. 2*.

Tribun. (2017, November 12). *Bappeda Kota Yogya Kaji Lahan Potensi Rusunawa*. (Tribun) Retrieved Januari 2018, from [TribunJogja.com: http://jogja.tribunnews.com/2017/11/12/bappeda-kota-yogya-kaji-lahan-potensi-rusunawa](http://jogja.tribunnews.com/2017/11/12/bappeda-kota-yogya-kaji-lahan-potensi-rusunawa)

Widaningrum , A., & Retnandari, N. D. (2016). Regulatory Oversight Melalui Analisis Dampak Regulasi (Regulatory Impact Analysis). In A. Subarsono, *Kebijakan Publik Dan Pemerintahan Kolaboratif Isu - Isu Kontemporer* (pp. 91-115). Yogyakarta: Gava Media.

Young, J., Shaxson, L., Jones, H., Hearn , S., Datta, A., & Cassidy, C. (2014). *Rapid Outcome Mapping Approach (Pedoman Untuk Pelibatan Dan Mempengaruhi Kebijakan)*. London: Overseas Development Institute.

## **REFERENSI LAIN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman